

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia mengarah pada pembangunan pertanian berkelanjutan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang di hadapi petani pada masa kini dan mempertimbangkan situasi masa yang akan datang (Rivai dan Anugrah, 2011). Indonesia dikenal sebagai negara agraris dimana pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, karena dalam melakukan pembangunan ekonomi suatu wilayah melibatkan sektor pertanian yang memberikan peluang kesempatan kerja lebih kurang 50% dibanding sekotr lain. Separyati (2008) mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dan sektor andalan dalam pembangunan suatu wilayah karena sebagai tulang punggung dan penggerak perekonomian nasional dalam mewujudkan tujuan nasional. Salah satu syarat umum suatu sektor dikatakan sebagai sektor andalan yaitu memiliki kontribusi yang cukup dominan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional (Nurif dan Mukhtar,2010).

Separyati (2008) juga menjelaskan bahwa pembangunan pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dilihat dari tujuan yang dicapai diantaranya: (a) mempertahankan ketahanan pangan; (b) membuka kesempatan kerja dan berusaha; (c) meningkatkan nilai tambah ekspor dan daya saing bagi produk pertanian; (d) pendorong tumbuhnya sektor industri sehingga meningkatkan pendapatan; dan (e) meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi kemiskinan pada masyarakat desa. Diperjelas juga oleh Nurif dan Mukhtar (2010) bahwa sektor pertanian terutama agribisnis memiliki peran yang sama yaitu dalam pemantapan ketahanan pangan, pengentas kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan

pendapatan.

Kebutuhan masyarakat Indonesia di sektor pertanian dilihat dari mayoritas makanan pokoknya mengkonsumsi beras yang selalu meningkat setiap tahunnya sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga pasokan beras dan mengurangi permasalahan impor beras dari luar. Oleh karena itu, petani berupaya untuk menghasilkan panen yang maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat menghasilkan produksi yang maksimal yaitu melalui pembangunan jaringan irigasi. Pembangunan jaringan irigasi merupakan salah satu pembangunan sektor pertanian terkait dengan pembangunan infrastruktur. Indonesia sebagai negara berkembang pembangunan infrastruktur pertanian akan berdampak baik terhadap produktivitas pertanian contohnya padi sawah. Menurut Apriyantono (2007) *dalam* Supriyadi (2008) dalam meningkatkan produktivitas khususnya tanaman padi maka pemerintah memprioritaskan program pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui Pancayasa Pembangunan Pertanian. Terdapat lima pilar utama Pancayasa Pembangunan Pertanian diantaranya perbaikan infrastruktur pertanian (termasuk didalamnya infrastruktur irigasi), pemberdayaan kelembagaan pertanian, penguatan modal dan skema pembiayaan, revitalisasi penyuluhan pertanian serta pengembangan pasar dan jaringan pemasaran.

Dalam sistem agribisnis terdapat beberapa subsistem yang saling terkait satu sama lain diantaranya subsistem hulu; subsistem usahatani; subsistem hilir dan subsistem penunjang. Pembangunan jaringan irigasi itu sendiri terdapat pada subsistem penunjang, dengan adanya jaringan irigasi mampu mengairi lahan dan menunjang produktivitas pertanian. Subsistem penunjang merupakan subsistem yang bersifat fisik dan fiskal, tidak hanya pembangunan jaringan irigasi melainkan juga ada lembaga yang berkaitan sebagai penunjang dalam pertanian (Nurif dan Mukhtar, 2010). Hal ini

dijelaskan oleh Rondhi,dkk (2015:174) bahwa irigasi merupakan faktor penunjang yang penting dalam meningkatkan produksi produk pertanian terutama produk pangan. Dapat dikatakan bahwa kegiatan pertanian tidak lepas dari air yang disediakan menggunakan prasarana irigasi.

Menurut (Ambler, 1992:3) *dalam* Putri (2019) pembangunan suatu sistem irigasi ialah penyiapan prasarana yang digunakan untuk menghantarkan air dari sumbernya ke lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dimana jaringan irigasi merupakan bentuk fisik atau perangkat kerasnya sedangkan untuk perangkat lunaknya yaitu berhubungan dengan kelembagaan yang diperlukan untuk mengelola jaringan irigasi tersebut sebagaimana mestinya sebagai lembaga penunjang. Di Indonesia sendiri bagi petani yang terlibat langsung dengan penggunaan air irigasi diberi kesempatan untuk mengelola dan mendirikan kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi.

Pembangunan pertanian terkait infrastruktur jaringan irigasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga harus dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan jaringan irigasi memerlukan pengaturan dan pengawasan agar tepat sasaran. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dikenal dengan P3A merupakan istilah umum yang digunakan untuk kelembagaan pengelola jaringan irigasi tingkat tersier yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis. Artinya, P3A bertanggung jawab atas segala sesuatu mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier untuk menunjang produktivitas pertanian (Ibrahim, 2017).

Menurut Saadah dkk, (2012:20) ada 3 unsur utama dalam pengelolaan pengairan yang merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan diantaranya: a) tersedianya sumberdaya yang memadai dalam pengelolaan irigasi; b) adanya organisasi yang mengatur dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada serta; c) adanya norma maupun aturan

yang menjadi pedoman yang efektif bagi organisasi untuk mengatur penggunaan sumberdaya pengairan secara adil dan efisien. Agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan irigasi, maka ketiga unsur tersebut harus memadai dan bersinergi satu sama lain dalam melakukan pengelolaan sumberdaya air irigasi.

Setelah dibentuknya lembaga irigasi seperti P3A diharapkan adanya kejelasan mengenai hak-hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air agar organisasi atau lembaga pengairan yang dibentuk dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan awal dibentuknya lembaga tersebut. Konsep efektifitas dapat dijadikan sebagai upaya dalam melakukan pengevaluasian jalannya suatu organisasi atau kelembagaan yang sesuai dengan tujuan yang dibuat. Efektifitas merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi baik dalam bentuk operasi, kegiatan atau program dari suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau intimidasi dalam pelaksanaannya (Kurniawan, 2005). Efektifitas adalah suatu unsur pokok dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam suatu organisasi, kegiatan maupun program. Suatu sistem dikatakan efektif apabila tujuan awal yang direncanakan tercapai, tepat guna dan tepat sasaran seperti yang diharapkan. Suatu kelembagaan dibentuk karena ada tujuan yang harus dicapai, tujuan yang dibuat sebelumnya mampu menjawab persoalan yang terjadi, maka dapat dikatakan suatu lembaga efektif.

B. Rumusan Masalah

Luas lahan sawah yang ada di kota Padang pada umumnya jenis pengairannya berasal dari irigasi dengan luas 6.173 hektar atau sebesar 96,2% sedangkan untuk non irigasi seluas 245 hektar atau sebesar 3,8%. Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan salah satu kecamatan terbesar yang seluruh pengairannya berasal dari irigasi yaitu seluas 578 hektar (Lampiran 1).

Dalam menunjang hasil produksi padi sawah dibantu dengan sarana irigasi, karena dalam penyediaan air melalui irigasi merupakan solusi yang

dapat mengatasi kekurangan air untuk keperluan pertanian dan rumah tangga yang biasa dikelola langsung oleh petani yang tergabung dalam sebuah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Sarwan, 2004). P3A Kola Jaya merupakan sebuah P3A yang berada di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Sumatera Barat. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ini didirikan pada tahun 2009 yang dipelopori oleh Bapak Ir. Amril Syaiin. Anggota P3A Kola Jaya keseluruhan berjumlah 331 orang, sedangkan untuk luas area kerja P3A Kola Jaya secara keseluruhan memiliki area kerja seluas 220 Ha. Wilayah kerja dari P3A Kola Jaya terdapat 4 DI, yaitu Daerah Irigasi Limau Manih dengan tiga daerah irigasi pembantu dimana adanya daerah irigasi pembantu (suplesi) diantaranya : Daerah Irigasi Koto Lalang; Daerah Irigasi Lubuk Napa; dan Daerah Irigasi Lubuk Hantu (Lampiran 4). P3A Kola Jaya ini terdiri dari 5 kelompok tani diantaranya : Kelompok Tani Saiyo, Kelompok Tani Harapan Jaya, Kelompok Tani Subur, Kelompok Tani Koto Duku, Kelompok Tani Gurun Kudu (Lampiran 2). Untuk sekretariat P3A Kola Jaya berada di Kampung Koto Duku, Kelurahan Koto Lalang dan sekarang P3A Kola Jaya sudah memasuki periode ketiga dalam kepengurusannya.

Daerah Irigasi (DI) Koto Lalang merupakan wilayah kerja dari P3A Kola Jaya dimana pada Tahun 2013 telah resmi menjadi irigasi semi teknis. Jaringan irigasi semi teknis yaitu jaringan irigasi yang konstruksi bangunan sadapnya semi permanen, pengukuran debit airnya sudah ada namun pengaturan debit airnya belum ada dan juga saluran pembawa dan saluran pembuangan tidak sepenuhnya terpisah. Daerah kerja dari DI Desa Koto Lalang merupakan yang terbesar dari daerah irigasi semi teknis yang lain pada P3A Kola Jaya. Dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar, P3A Kola Jaya diharapkan mampu dalam melakukan pengelolaan jaringan irigasi tersier baik itu operasi maupun pemeliharannya yang tujuannya agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekitar. P3A Kola Jaya dalam pengembangannya juga tidak terlepas dari permasalahan terkait keefektifan

dalam menjalankan fungsinya terkait pengelolaan jaringan irigasi tersier. Pada awal tahun berdirinya P3A Kola Jaya banyak memiliki prestasi, dimana prestasi yang diraih oleh P3A Kola Jaya ini tidak hanya di tingkat Kota, tapi sudah di tingkat Provinsi dan Nasional. Namun beberapa tahun terakhir kinerja dari P3A Kola Jaya tidak seperti biasanya.

Permasalahan yang dihadapi P3A Kola Jaya pada Daerah Irigasi Koto Lalang terletak pada pendistribusian air dimana petani bagian hilir tidak mendapatkan air secara optimal dikarenakan air sudah terpecah-pecah ke got pembuangan sehingga air tidak lagi maksimal sampai ke sawah bagian hilir. Terdapat pemeliharaan jaringan irigasi yang kurang baik yang termasuk dalam tanggung jawab dari P3A yang melakukan pemantauan dan pengelolaan air pada jaringan irigasi tersier ini. Wewenang dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier pada DI Koto Lalang menjadi wewenang penuh dari P3A Kola Jaya, sehingga peran dan tujuan adanya P3A harus sesuai dengan yang ditetapkan agar berjalan sesuai harapan dengan tujuan agar produktifitas petani terutama untuk padi sawah tidak menurun baik pada bagian hulu, bagian tengah, maupun hilir. Menyangkut kelembagaan P3A Kola Jaya yang menjadi kendala yaitu terkait sumber daya manusianya seperti keaktifan anggota yang kurang dalam melakukan pengelolaan jaringan irigasi terutama dalam hal pemeliharaan jaringan irigasi. Gejala ketidakefektifan lain terlihat dari ketidakdisiplinan anggota dalam membayar IPAIR (Iuran Pengelolaan Air) dimana jumlah yang ditetapkan terbilang cukup terjangkau dengan jumlah iuran yang diminta ditentukan oleh pengurus P3A Kola Jaya dan anggota sebanyak 1 *Gantang* padi ketika musim panen yang digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ataupun rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Ketaatan atau partisipasi anggota P3A Kola Jaya yang kurang dalam menghadiri setiap kegiatan yang diadakan seperti kegiatan *Plakat Turun ke Sawah* (musyawarah yang diadakan P3A dalam waktu triwulan atau sekali per musim tanam untuk membahas perencanaan mengenai bibit yang akan digunakan, pupuk yang akan dipakai, perencanaan gotong royong yang akan

diadakan, dan lain-lain). Oleh karena itu, peran kelembagaan menjadi fokus untuk melihat efektif tidaknya dalam mengkoordinir anggotanya. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dari lembaga tersebut untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan tugas dari P3A Kola Jaya dalam pengelolaan jaringan irigasi tingkat tersier, apakah fungsi dan perannya sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada DI Koto Lalang. Apabila dalam menjalankan perannya belum efektif, maka perlu dilakukan tindak lanjut untuk kedepannya agar lebih baik. Oleh karena itu, perlu dinilai sejauh mana efektifitas pelaksanaan tugas kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kola Jaya dalam rangka meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi agar P3A Kola Jaya dapat diberdayakan dengan baik.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang **“Efektifitas Pelaksanaan Tugas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier Pada P3a Kola Jaya di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang”** dengan aspek berikut ini :

- 1) Bagaimana pengelolaan jaringan irigasi tersier oleh lembaga P3A Kola Jaya di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang ?
- 2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan tugas oleh P3A Kola Jaya dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier pada Daerah Irigasi Koto Lalang di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan bagaimana pengelolaan jaringan irigasi tersier oleh P3A Kola Jaya di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
- 2) Mengukur efektifitas pelaksanaan tugas oleh P3A Kola Jaya dalam mengelola jaringan irigasi tersier pada Daerah Irigasi Koto Lalang di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :

- 1) Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam mengkaji penelitian yang serupa.
- 2) Bagi pemerintah terkait penelitian ini agar dapat dijadikan evaluasi dalam melakukan pembangunan pertanian kedepannya dengan melihat peran lembaga petani yang ada.
- 3) Bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kola Jaya dan P3A lainnya, penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan masukan agar P3A dapat terus berkelanjutan sesuai dengan tujuan awal.

